

ABSTRACT

A complaint of adultery as grounds for divorce is a report by one of the spouses (husband or wife) to the authorities that their partner has committed adultery, which is then used as the basis for filing for divorce due to a perceived breach of marital fidelity. The purpose of this study was, firstly, to determine the implementation of the requirements for a request for divorce or separation of bed and board in a complaint of adultery. This study aimed to determine the legal consequences if the complaint is not accompanied by a request for divorce or separation of bed and board in an adultery complaint. This study used a normative, prescriptive juridical approach, with secondary data collected through literature review, presented in descriptive form and analyzed using qualitative normative analysis. Based on the research results and discussion, the following conclusions are drawn: Implementation of the requirements for divorce in adultery complaints. Court decisions and interviews with law enforcement officials indicate that a request for divorce or separation of bed and board is not a mandatory requirement in adultery complaints. Divorce serves only as supporting evidence, while criminal proceedings can continue as long as the elements of the crime of adultery are proven and the evidence is sufficient, as this offense is an absolute complaint offense that is processed independently of the divorce case. Legal consequences if a complaint is not accompanied by a divorce request. A complaint of adultery remains valid and can be prosecuted even without a divorce request. The victim's marriage remains valid, but the perpetrator can still be punished if the elements of Article 284 of the Criminal Code are proven. The criminal and civil proceedings are separate, with the criminal decision being used as the basis for a divorce suit if filed later.

Keywords: Divorce, Complaint, Criminal Act, Adultery.

ABSTRAK

Pengaduan perzinahan sebagai alasan perceraian adalah laporan oleh salah satu pasangan (suami atau istri) kepada pihak berwenang bahwa pasangannya telah melakukan perzinahan, yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan perceraian karena dianggap melanggar kesetiaan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui pelaksanaan persyaratan permohonan perceraian atau pemisahan tempat tidur dan makan dalam pengaduan perzinahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika pengaduan tidak disertai dengan permintaan perceraian atau perpisahan tempat tidur dan makan dalam pengaduan perzinahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan preskriptif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan persyaratan perceraian dalam pengaduan perzinahan. Keputusan pengadilan dan wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa permintaan perceraian atau pemisahan tempat tidur dan makan bukanlah persyaratan wajib dalam pengaduan perzinahan. Perceraian hanya berfungsi sebagai bukti pendukung, sedangkan proses pidana dapat dilanjutkan selama unsur-unsur tindak pidana perzinahan terbukti dan buktinya cukup, karena pelanggaran ini merupakan tindak pidana pengaduan mutlak yang diproses secara independen dari kasus perceraian. Konsekuensi hukum jika pengaduan tidak disertai dengan permintaan cerai. Pengaduan perzinahan tetap berlaku dan dapat dituntut bahkan tanpa permintaan perceraian. Pernikahan korban tetap sah, namun pelaku tetap dapat dihukum jika unsur-unsur Pasal 284 KUHP terbukti. Proses pidana dan perdata terpisah, dengan keputusan pidana digunakan sebagai dasar gugatan perceraian jika diajukan kemudian.

Kata kunci: Perceraian, Pengaduan, Tindak Pidana, Perzinahan.